

BAB II

DINAMIKA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)

OKI merupakan organisasi internasional terbesar ke dua setelah Persatuan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini menjadi kekuatan besar yang mewakili Dunia Islam dalam percaturan politik global. Dengan banyaknya badan-badan struktural yang menopang laju kerja OKI, organisasi ini terus mengembangkan skala kerjanya menjadi lebih komprehensif pada banyak bidang yang menyangkut kemajuan umat muslim. Sejak berdirinya hingga berpuluh-puluh tahun eksis, OKI jelas menampakkan banyak kemajuan yang pesat, ditandai dengan dibangunnya banyak badan-badan OKI yang lebih sistematis dan beranekaragam serta kemajuan negara-negara anggotanya secara individu. Meski tidak dapat dipungkiri, hadirnya tantangan-tantangan eksternal maupun internal telah menambah pekerjaan rumah para pembuat kebijakan di tubuh OKI serta merongrong aktivitas OKI yang ingin terus *survive* dalam pentas politik internasional.

A. Sejarah Singkat Pembentukan OKI

OKI didirikan berdasarkan keputusan pada konferensi bersejarah di Rabat, Maroko, pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) sebagai reaksi keras yang dipicu oleh pembakaran masjid Al-Aqsha yang terletak di kota Quds, Yerusalem.¹ Konferensi ini merupakan titik awal pembentukan OKI atas prakarsa Raja Faisal dari

¹<http://www.oic-un.org/>, diakses tanggal 4 Maret 2015.

Arab Saudi dan Raja Hasan dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Maroko. Konferensi Tingkat Tinggi Islam pertama tersebut berlangsung pada 22-25 September 1969.²

Secara runtut latar belakang terbentuknya OKI diawali sejak tahun 1964 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu. Pada KTT tersebut timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.³ Selanjutnya pada tahun 1965, diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah, Saudi Arabia, yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.

Pada tahun 1967 pecah perang Timur Tengah melawan Israel.⁴ Oleh karenanya solidaritas dan *ghiroh* persatuan jihad Islam di negara-negara Timur Tengah terus meningkat. Di tahun berikutnya, 1968, Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka peninjauan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.

Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Masjid Al Aqsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.⁵ Tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-

² Dokumen Direktorat Jenderal KPI, Loc. Cit.

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

negara Islam di Rabat, Maroko, untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel.⁶ Dari KTT inilah OKI berdiri.

B. Tujuan dan Prinsip OKI

Tujuan OKI yang tercantum dalam bab I artikel 1 Piagam OKI adalah sbagai berikut:⁷

1. Untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara negara-negara anggota
2. Untuk menjaga dan melindungi kepentingan bersama, mendukung legitimasi negara anggota, mengkoordinasikan dan menyatukan upaya negara-negara anggota mengingat tantangan yang dihadapi oleh Dunia Islam khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya.
3. Untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri dan non-interfensi urusan di dalam negeri , dan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah masing-masing negara anggota.
4. Untuk mendukung pemulihan kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota yang berada di bawah pendudukan, sebagai akibat dari agresi, atas dasar hukum internasional dan kerjasama dengan organisasi internasional maupun regional yang relevan.

⁶ Ibid.,

⁷ OIC Charter

5. Untuk memastikan partisipasi aktif negara-negara anggota dalam percaturan politik global, ekonomi dan proses pembuatan kebijakan sosial untuk mengamankan kepentingan bersama.
6. Untuk mempromosikan hubungan antar negara berdasarkan keadilan, saling menghormati untuk memastikan terciptanya perdamaian, keamanan, dan harmoni secara global.
7. Untuk menegaskan kembali dukungan terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam piagam PBB dan hukum internasional.
8. Untuk mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara berdaulat.
9. Memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan intra Islam, dalam rangka mencapai integrasi ekonomi yang mengarah pada pembentukan common market yang berafiliasi Islam.
10. Mengerahkan upaya untuk mencapai pembangunan manusia dan ekonomi sejahtera yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam tubuh negara-negara anggota.
11. Untuk menyebarluaskan, mempromosikan dan menyebarluaskan ajaran dan nilai-nilai Islam berdasarkan kebebasan dan toleransi, mempromosikan budaya Islam dan melindungi warisan sejarah Islam.
12. Melindungi dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya, memerangi pencemaran nama baik Islam dan mendorong dialog antar peradaban dan agama.

13. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong penelitian dan kerjasama negara-negara anggota dalam bidang tersebut.
14. Mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar termasuk hak kaum wanita, anak-anak, remaja, orang tua, dan orang-orang berkebutuhan khusus juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai keluarga Islam.
15. Menekankan, melindungi dan mempromosikan peran keluarga sebagai unit sosial yang fundamental.
16. Melindungi hak-hak, martabat, dan identitas agama dan budaya masyarakat muslim di negara non-member di mana muslim hidup sebagai minoritas.
17. Mempromosikan dan mempertahankan persatuan pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dalam forum internasional.
18. Bekerjasama dalam memerangi terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, korupsi, pencucian uang dan perdagangan manusia.
19. Bekerjasama dan berkoordinasi dalam keadaan darurat kemanusiaan seperti bencana alam.
20. Meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial, kebudayaan dan informasi di antara negara-negara anggota.

Prinsip OKI yang tercantum dalam bab I artikel 2 piagam OKI adalah sebagai berikut:⁸



1. Seluruh negara anggota berkomitmen pada tujuan dan prinsip piagam PBB.
2. Seluruh negara anggota adalah negara yang berdaulat, merdeka dan setara dalam hak dan kewajibannya.
3. Seluruh anggota wajib menyelesaikan perselisihannya melalui cara-cara damai dan menahan diri untuk menggunakan ancaman atau kekerasan dalam pergaulan mereka.
4. Seluruh anggota berjanji untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara anggota lainnya dan harus menahan diri dari tindakan mencampuri urusan nasional negar lain.
5. Seluruh anggota berjanji untuk berkontribusi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan negara lain sebagaimana tercantum dalam piagam OKI, PBB, Hukum Internasional, dan Hukum Humaniter Internasional.
6. Negara anggota wajib menegakkan dan mempromosikan, baik level nasional maupun internasional, tata pemerintahan yang baik, demokrasi, HAM, dan kebebasan dasar, serta supremasi hukum.
7. Negara anggota wajib berupaya melindungi dan melestarikan lingkungan.

⁸ Ibid.,

C. Negara-Negara dan Organisasi yang Tergabung dalam Keanggotaan OKI

Negara anggota OKI (anggota permanen) berjumlah 57 negara yang tersebar lintas benua. Keanggotaan 57 negara tersebut dimulai sejak tahun 1969 dalam KTT bersejarah di Rabat, Maroko. Kriteria untuk negara anggota OKI diantaranya adalah negara yang berdaulat dan memiliki populasi muslim sebagai mayoritas.⁹Kewajiban negara anggota OKI tertuang dalam prinsip-prinsip OKI yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Pada masa kelahiran OKI di tahun 1969, keanggotaan OKI diisi oleh negara-negara pemrakarsa berdirinya OKI yaitu: Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, serta beberapa negara lain diantaranya : Yordania, Afghanistan, Indonesia, Turki, Republik Chad, Tunisia, Aljazair, Senegal, Sudan, Republik Gunea, Palestina, Qwait, Lebanon, Libya, Mali, Mesir, dan Mauritania. Beberapa negara bergabung di waktu berikutnya hingga ditutup oleh keanggotaan Cote D'Ivoire pada tahun 2001 sebagai anggota ke 57.

Secara lengkap negara anggota OKI adalah sebagai berikut:¹⁰

No.	Negara	Tahun Bergabung dengan OKI
1.	 Kingdom of Saudi	1969
2.	 Kingdom of MOROCCO	1969

⁹ "Gambia Backs Philippines' Bid for Observer Status in OIC," dari <http://www.statehouse.gm/asia-visit-phlpines-june20-24.htm> Diakses tanggal 13 April 2015.

¹⁰<http://www.oic-oci.org/oicv2/states/>, diakses tanggal 22 Maret 2015.

3.	 Republic of NIGER	1969
4.	 MALAYSIA	1969
5.	 Republic of SOMALIA	1969
6.	 Islamic Republic of PAKISTAN	1969
7.	 Islamic Republic of IRAN	1969
8.	 Republic of YEMEN	1969
9.	 Arab Republic of EGYPT	1969
10.	 Islamic Republic of MAURITANIA	1969
11.	 Republic of MALI	1969
12.	 Libya	1969
13.	 Republic of LEBANON	1969
14.	 State of PALESTINE	1969

15.	 State of KUWAIT	1969
16.	 Republic of GUINEA	1969
17.	 People's Democratic Republic of ALGERIA	1969
18.	 Republic of TUNISIA	1969
19.	 Republic of UZBEKISTAN	1969
20.	 Republic of SENEGAL	1969
21.	 Republic of CHAD	1969
22.	 Republic of SURINAME	1969
23.	 Islamic Republic of AFGHANISTAN	1969
24.	 Hashemite Kingdom of JORDAN	1969
25.	 Republic of INDONESIA	1969
26.	 Republic of The SUDAN	1969

27.	 Republic of TURKEY	1969
28.	 State of The UNITED ARAB EMIRATES	1972
29.	 State of QATAR	1972
30.	 Kingdom of BAHRAIN	1972
31.	 Republic of SIERRA LEONE	1972
32.	 SYRIAN Arab Republic	1972
33.	 Sultanate of OMAN	1972
34.	 Republic of GABON	1974
35.	 Republic of CAMEROON	1974
36.	 Republic of GUINEA-BISSAU	1974
37.	 BURKINA-FASO	1974
38.	 People's Republic of BANGLADESH	1974

39.	 Republic of The GAMBIA	1974
40.	 Republic of UGANDA	1974
41.	 Republic of IRAQ	1975
42.	 Republic of MALDIVES	1976
43.	 Union of The COMOROS	1976
44.	 Republic of DJIBOUTI	1978
45.	 Republic of BENIN	1983
46.	 BRUNEI-DARUSSALAM	1984
47.	 Federal Republic of NIGERIA	1986
48.	 Republic of AZERBAIJAN	1992
49.	 Republic of TAJIKISTAN	1992
50.	 Turkmenistan	1992

51.	 Republic of ALBANIA	1992
52.	 KYRGYZ Republic	1992
53.	 Republic of MOZAMBIQUE	1994
54.	 Republic of KAZAKHSTAN	1995
55.	 Republic of TOGO	1997
56.	 Republic of GUYANA	1998
57.	 Republic of COTE D'IVOIRE	2001

Untuk menampung aspirasi negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim, atau organisasi lain yang ingin bergabung dalam keanggotaan OKI, maka dibentuklah keanggotaan sebagai pengamat atau anggota *observer* yang penerimaannya diputuskan dengan konsensus para menteri Luar Negeri negara

OKI.¹¹ Dalam penerimaannya, salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah anggota pengamat tidak boleh terlibat dalam sengketa apapun dengan anggota OKI.¹²

Status pengamat adalah hak istimewa yang diberikan oleh beberapa organisasi kepada pihak non-anggota untuk memberi mereka kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Status pengamat sering diberikan oleh organisasi antar pemerintah (IGO) ke negara-negara non-anggota dan lembaga swadaya masyarakat internasional (INGO) yang memiliki kepentingan dalam kegiatan IGO itu. Pengamat umumnya memiliki kemampuan terbatas untuk berpartisipasi dalam IGO, tidak memiliki kemampuan untuk memilih atau

mengusulkan resolusi.¹³ Status pengamat di OKI pun mengikuti kaidah anggota pengamat yang juga dipakai oleh organisasi internasional lain seperti PBB bahwa observer hanya sebagai supporting unit di lingkaran luar keanggotaan OKI yang tidak memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan organisasi atau resolusi.

Dalam keanggotaan OKI, di samping 57 negara anggotanya (anggota permanen), anggota lain yang berstatus pengamat diisi oleh negara-negara berdaulat, Organisasi Islam, Institusi Islam, dan Organisasi Internasional. Anggota pengamat OKI secara lengkap adalah sebagai berikut:¹⁴

¹¹Jerome Aning, "Odds of RP Getting OIC Observer Seat Better," *Philippine Daily Inquirer*, dari <http://globalnation.inquirer.net/news/news/view/20090312-193806/Odds-of-RP-getting-OIC-observer-seat-better>. Diakses tanggal 13 April 2015.

¹² Abdul Aziz, "Why Not India in OIC", http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/opinion/2009/October/opinion_October43.xml§ion=opinion&col. Diakses tanggal 13 April 2015.

¹³<http://www.un.org/en/members/aboutpermobservers.shtml>, diakses tanggal 13 April 2015.

¹⁴http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=179&p_ref=60&lan=en, diakses pada 13 April 2015.

No.	Negara	Tahun Bergabung dengan OKI Sebagai Observer
1.	Cyprus Turki	1979
2.	Bosnia-Herzegrovina	1994
3.	Republik Asia Tengah	1996
4.	Kingdom of Thailand	1998
5.	Federasi Rusia	2005
Organisasi Islam		
1.	Moro National Liberation Front – MNLF	1977
Institusi Islam		
1.	Parliamentary Union of the OIC Member States - PUOICM	2000
Organisasi Internasional		
1.	Liga Arab	1975
2.	Persatuan Bnagsa-Bangsa	1976

3.	Gerakan Non-Blok	1977
4.	Africa Union (AU)	1977
5.	Economic Cooperation Organization (ECO)	1995

D. Badan-Badan Utama Penyokong Inti Kerja OKI

OKI meliputi badan sebagai berikut:¹⁵

1. The Islamic Summit, terdiri dari kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota. The Islamic Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam OKI merupakan otoritas tertinggi dalam organisasi. The Islamic Summit diadakan sekali dalam tiga tahun –sebelum tahun 1981 diadakan sekali dalam 5 tahun- untuk membicarakan, mengambil keputusan atas kebijakan dan memberikan pedoman.
2. Dewan Menteri Luar Negeri. Melakukan pertemuan sekali dalam setahun, dewan ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan kebijakan umum OKI. Dewan ini dapat mengambil keputusan dan resolusi dalam masalah kepentingan bersama dan mengulas progres penerapan keputusan dan resolusi yang diambil dari dewan Menteri Luar Negeri maupun The Islamic Summit. Konferensi yang diadakan sekali dalam setahun ini disebut Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI.

¹⁵Dokumen Direktorat Jenderal KPI, Loc.Cit.

3. Komite eksekutif memegang kekuasaan dalam pembuatan keputusan di antara pertemuan kementerian. Komite ini dibentuk pada tahun 2005 untuk meningkatkan kemampuan OKI bergerak lebih cepat dan efektif pada hal yang menjadi perhatian internasional atas negara anggotanya. Komite eksekutif disusun dari pimpinan yang masih menjabat, melanjutkan dan menyukseskan KTT Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Saudi dan Sekretaris Jendral.
4. Komite Perwakilan Permanen terdiri dari duta negara-negara yang terdaftar dalam keanggotaan OKI.
5. Sekretaris Jendral adalah badan eksekutif OKI dan penerap keputusan kedua badan pembuat keputusan politik. Sekretaris Jendral OKI berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Sekretaris Jendral dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri untuk jangka waktu 5 tahun, yang selanjutnya dapat dipilih kembali hanya dalam 1 periode saja. Sekretaris Jendral dipilih dari kalangan warga negara dari negara-negara anggota OKI yang disesuaikan dengan prinsip pemerataan geografis dan kesempatan yang sama bagi semua negara-negara anggota dengan pertimbangan kompetensi, integritas dan pengalaman.

Sekretaris jendral memiliki tanggungjawab sebagai berikut:¹⁶

¹⁶http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=38&p_ref=14&lan=en, diakses tanggal 13 April 2015.

1. Memperhatikan kompetensi badan organisasi, yang menurutnya dapat memberi pelayanan atau malah membahayakan tujuan organisasi.
2. Menindaklanjuti implementasi keputusan, resolusi dan rekomendasi dari KTT, KTM, dan pertemuan lainnya.
3. Menyediakan lembar kerja dan memorandum bagi negara anggotadalam implementasi keputusan, resolusi dan rekomendasi dari KTT dan KTM.
4. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan laju kerja organ-organ yang relevan dalam organisasi.
5. Mempersiapkan program dan anggaran Sekretaris Jendral.
6. Meningkatkan komunikasi di antara negara-negara anggota dan memfasilitasi konsultasi dan pertukaran pandangan serta penyebaran informasi penting bagi negara-negara anggota.
7. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diamanatkan oleh KTT Islam atau KTM.
8. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Menteri Luar Negeri atas kinerja organisasi.

Secara berturut-turut, Sekretaris Jenderal yang telah melaksanakan tugasnya sejak OKI berdiri hingga tahun 2005, adalah :¹⁷

1. H. Tunku Abdul Rahman (Malaysia) 1971-1973
2. Hassan Al-Touhami (Mesir) 1974-1975
3. Dr. Amadou Karim Gaye (Senegal) 1975-1979
4. Mr. Habib Chatty (Tunisia) 1979-1984
5. Syed Sharifuddin Pirzada (Pakistan) 1985-1988
6. Dr. Hamid Algabid (Nigeria) 1989-1996
7. Dr. Azeddine Laraki (Maroko) 1997-2000
8. Dr. Abdelouahed BELKEZIZ (Maroko) 2001-2004
9. Prof. Dr. EKMELEDDIN IHSANOGLU (Turki) 2005

Secara Rinci, Sekretaris Jendral beserta konferensi OKI yang digelar pada masa kepemimpinan masing-masing Sekjen dijelaskan dalam tabel berikut:

Sekretaris Jendral / Konferensi		Waktu Diselenggarakan Konferensi
1. H. Tunku Abdul Rahman (Malaysia) 1971-1973		
	KTM	
	KTM II di Karachi, Pakistan	Desember 1971
	KTM III di Jeddah, Saudi Arabia	Februari-Maret 1972
	KTM IV di Bengazi, Libya	24-26 Maret 1973
2. Hassan Al-Touhami (Mesir) 1974-1975		

¹⁷ Ibid.,

<u>KTT</u>		
KTT II di Lahore, Pakistan		22-24 February 1974
	<u>KTM</u>	
	KTM V di Kuala Lumpur, Malaysia	21-25 Juni 1974
	KTM VI di Jeddah, Saudi Arabia	12-17 Juli 1975
3. Dr. Amadou Karim Gaye (Senegal) 1975-1979		
	<u>KTM</u>	
	KTM VII di Istanbul, Turki	12-15 Mei 1976
	KTM VIII di Tripoli, Libya	16-22 Mei 1977
	KTM IX di Dakar, Senegal	24-28 April 1978
	KTM X di Fez, Maroko	Mei 8-12 Mei 1979
4. Mr. Habib Chatty (Tunisia) 1979-1984		
<u>KTT</u>		
KTT III di Mekkah, Saudi Arabia		25-28 January 1981
KTT IV di Casablanca, Maroko		16-19 January 1984
	<u>KTM</u>	
	KTM XI di Islamabad, Pakistan	17-22 Mei 1980
	KTM XII di Baghdad, Irak	1-5 Juni 1981
	KTM XIII di Niamey, Nigeria	22-26 Agustus 1982
	KTM XIV di Dhaka, Bangladesh	6-11 Desember 1983

	KTM XV di Sana'a, Yaman Utara	18-22 Desember 1984
5. Syed Sharifuddin Pirzada (Pakistan) 1985-1988		
<u>KTT</u>		
KTT V di Kuwait		26-29 January 1987
	<u>KTM</u>	
	KTM XVI di Fez, Maroko	6-10 Januari 1986
	KTM XVII di Amman, Jordania	21-25 Maret 1988
6. Dr. Hamid Algabid (Nigeria) 1989-1996		
<u>KTT</u>		
KTT VI di Dakar, Senegal		9-11 Desember 1991
KTT VII di Casablanca, Maroko		13-15 Desember 1994
	<u>KTM</u>	
	KTM XVIII di Riyadh, Saudi Arabia	13-16 Maret 1989
	KTM XIX di Kairo, Mesir	31 Juli-5 Agustus 1990
	KTM XX di Istanbul, Turki	4-8 Agustus 1991
	KTM XXI di Karachi, Pakistan	25-29 April 1993
	KTM XXII di Casablanca, Maroko	10-12 Desember 1994
	KTM XXIII di Conakry, Guinea	9-12 Desember 1995
	KTM XXIV di Jakarta, Indonesia	9-13 Desember 1996

7. Dr. Azeddine Laraki (Maroko) 1997-2000		
<u>KTT</u>		
KTT VIII di Teheran, Iran		9-11 Desember 1997
KTT IX di Doha, Qatar		12-13 November 2000
	<u>KTM</u>	
	KTM Luar Biasa di Islamabad, Pakistan	23 Maret 1997
	KTM XXV di Doha, Qatar	15-17 Maret 1998
	KTM XXVI di Ouagadougou, Burkina Faso	28 Juni – 1 Juli 1999
	KTM XXVII di Kuala Lumpur, Malaysia	27-30 Juni 2000
8. Dr. Abdelouahed BELKEZIZ (Maroko) 2001-2004		
<u>KTT</u>		
KTT X di Kuala Lumpur, Malaysia		16-17 Oktober 2003
	<u>KTM</u>	
	KTM XXVIII di Bamako, Mali	25-29 Juni 2001
	KTM XXIX di Khartoum, Sudan	25-27 Juni 2002
	KTM XXX di Teheran, Iran	28-30 Mei 2003
	KTM XXXI di Istanbul, Turki	14-16 Juni 2004
9. Prof. Dr. EKMELEDDIN IHSANOGLU (Turki) 2005		
	<u>KTM</u>	

	KTM XXXII di Sana'a, Yaman	28-30 Juni 2005
	KTM Luar Biasa di Makkah, Saudi Arabia	7-8 Desember 2005

E. Badan-badan Subsider dalam Tubuh OKI

Badan-badan subsider OKI ditetapkan dalam satu kerangka Organisasi ini berdasarkan keputusan KTT Islam maupun KTM. Pihak-pihak yang menjadi anggota badan subsider adalah seluruh negara anggota permanen OKI . Terdapat 7 badan subsider yang masing-masing memiliki area kerja yang berbeda. Badan-badan subsider OKI diantaranya:¹⁸

1. Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC)

SESRIC merupakan badan subsider OKI yang didirikan di Tripoli pada tahun 1977 dalam KTM ke 8 OKI. Sesuai dengan namanya, badan ini didirikan dalam rangka mendukung aktivitas bersama dalam bidang pelatihan dan penelitian statistik, ekonomi dan sosial. Badan ini berkedudukan di Ankara, Turki.

2. Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA)

IRCICA memulai aktivitasnya pada 1980 sebagai badan subsider OKI pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap kebudayaan. Berdirinya badan ini

¹⁸http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=64&p_ref=33&lan=en, diakses tanggal 13 April 2015.

diusulkan oleh Turki dalam KTM ke 7 OKI pada tahun 1976 di Istanbul. Markas IRCICA berada di Istanbul, Turki.

3. Islamic University of Technology (IUT)

IUT didirikan sebagai badan subsider OKI dalam KTM ke sembilan di Dakkar, Senegal, pada April 1978, dengan nama awal ICTVTR lalu kemudian berganti menjadi Islamic Institute of Technology. Nama IIT resmi berganti menjadi IUT pada KTM ke 28 yang digelar di Mali, 25-27 Juni 2001. IUT berlokasi di Dhaka, Bangladesh. Secara umum, tujuan didirikannya IUT adalah untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia di dalam tubuh anggota OKI dalam bidang teknik, permesinan dan pendidikan kejuruan.

4. Islamic Center for the Development of Trade (ICDT)

ICDT didirikan sebagai badar subsider OKI pada KTT Islam ke 3 di Makkah Al-Mukaromah, Saudi Arabia, Januari 1981. Tujuan didirikannya ICDT adalah untuk mempromosikan pertukaran perdagangan antar anggota OKI. Bentuk promosi perdagangan yang dilakukan ICDT diantaranya dengan penyelenggaraan pameran, menghimpun investor dari negara-negara anggota OKI, memberikan simposium dan pelatihan, riset dan studi penelitian, serta membantu negara anggota untuk menciptakan organisasi yang mendukung bidang perdagangan, atau mendukung peran negara anggotanya untuk lebih kuat dalam organisasi perdagangan internasional yang sudah ada. ICDT bermarkasi di Casablanka, Moroko.

5. International Islamic Fiqh Academy (IIFA)

Dalam KTT Islam OKI ke tiga yang digelar di Makkah Al-Mukaromah, Saudi Arabia, juga menghasilkan konsensus untuk mendirikan badan subsider lainnya yaitu International Islamic Fiqh Academy (IIFA). IIFA memiliki tujuan di antaranya: Untuk mencapai kesatuan teoritis dan praktis dari umat Islam, memperluas link dengan organisasi islam, dan mempelajari sistem syariah. IIFA bermarkas di Jeddah, Sudi Arabia.

6. Islamic Solidarity Fund and its Waqf (ISF)

ISF merupakan badan subsider OKI yang didirikan pada KTT Islam OKI ke dua yang digelar di Lahore pada Februari 1974 di Lahore, Pakistan. Tujuan didirikannya ISF adalah berupaya untuk meningkatkan intelektual dan moral umat islam di dunia, memberikan bantuan material bagi keadaan darurat atau bencana alam serta memberdayakan umat Islam minoritas agar dapat meningkatkan standar agama, sosial dan budaya mereka. Badan subsider ini bermarkas di Jeddah, Saudi Arabia.

7. The Real Estate Union in Islamic States (REUOS)

Keanggotaan REUOS tidak terbatas pada negara saja, namun lebih mengakar pada kelompok bisnis real estate, perusahaan dan organisasi serta para ahli yang berkecimpung dalam bidang real estate di seluruh negara Islam. Pada dasarnya tujuannya didirikannya badan subsider satu ini adalah dalam rangka mengembangkan bisnis dan pemasaran mereka ke dimensi internasional.

F. Badan-badan Khusus yang Dibentuk OKI

Badan khusus didirikan berdasarkan keputusan pada KTT Islam maupun KTM yang keanggotaannya opsional dan terbuka bagi seluruh negara anggota. Anggaran badan-badan khusus OKI tersebut bersifat independen dan mandiri berdasarkan aturan yang mereka tetapkan dalam Anggaran Dasar.

Organ khusus OKI diantaranya adalah:¹⁹

1. Islamic Development Bank (IDB)

IDB merupakan institusi finansial OKI yang didirikan pada KTM ke dua di Karachi pada 1970. IDB resmi dibuka sebagai bank pembangunan Islam pada 20 Oktober 1975. Pendirian IDB didasarkan pada tujuan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota serta komunitas Islam berdasarkan prinsip syariah. Fungsi yang sama dengan bank-bank pada umumnya, IDB juga memberikan pinjaman bagi kegiatan-kegiatan produktif dan memberikan bantuan dalam rangka mempercepat laju pembangunan ekonomi di negara anggota. Markas IDB berlokasi di Jeddah, Saudi Arabia.

2. Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)

ISESCO merupakan badan khusus yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi yang didirikan pada KTM ke sebelas di Islamabad, Mei 1980. ISESCO bermarkas di Rabat, Maroko.

3. Islamic Broadcasting Union (IBU)

¹⁹http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=65&p_ref=34&lan=en, diakses tanggal 13 April 2015.

Badan khusus OKI yang mulanya bernama Islamic States Broadcasting Organization (ISBO) didirikan pada KTM ke enam di Jeddah, Saudi Arabia, Juli 1975. Tujuan didirikannya IBU secara umum adalah sebagai media syiar dakwah Islam, menyatukan suara umat, memperkuat semangat persaudaraan dan memberi pengenalan antar umat muslim satu sama lain serta sebagai media promosi organisasi. Badan khusus ini bermarkas di Jeddah, Saudi Arabia.

4. International Islamic News Agency (IINA)

IINA dibentuk pada KTM ke tiga pada tahun 1972 yang digelar di Jeddah, sebagai tindak lanjut dari keputusan sebelumnya pada KTT Islam di Karachi pada tahun 1970. Tidak jauh beda dengan IBU, tujuan didirikannya IINA diantaranya adalah untuk mempererat hubungan negara-negara anggota dalam bidang informasi, mempromosikan kontak dan kerjasama teknis antar kantor berita negara-negara anggota, dan bekerja untuk lebih memahami masyarakat Islam beserta masalah politik, sosial dan ekonomi di Dunia Islam.

5. Islamic Committee of the International Crescent (ICIC)

ICIC bekerja untuk meredakan penderitaan akibat bencana alam dan perang. Badan khusus ini didirikan pada KTM ke delapan di Tripoli, Mei 1977. Tugas ICIC adalah memberikan bantuan medis bagi penanggulangan derita korban bencana alam

serta menyediakan berbagai bantuan kemanusiaan. Markas besar ICIC berlokasi di Benghazi, Libya.

G. Pembentukan Komite Tetap OKI

Komite tetap (standing committee) OKI dibentuk untuk menangani isu-isu yang penting di negara anggota atau di dalam tubuh OKI itu sendiri. Komite ini bekerja dalam fokus dan framework yang lebih dalam dalam rangka efisiensi kinerja OKI yang lebih umum. Diantara komite tetap OKI adalah:²⁰

1. Al Quds Committee

Komite Al-Quds didirikan pada KTM ke 6 di Jeddah, Saudi Arabia, 1975. Diantara tujuan didirikannya komite ini adalah untuk menindaklanjuti implementasi resolusi konflik Arab-Israel. Keanggotaan komite ini diperbarui setiap 3 tahun dalam sidang Meteri Luar Negeri.

2. Bayt Mal Al Quds Agency

Bayt Mal Al Quds Agency didirikan atas usul Raja Hasan II dari Maroko. Ide tersebut disampaikan dalam KTM ke 23 di Conarky, Republik Gunea pada Desember 1995. Komite tetap OKI ini resmi diumumkan 3 tahun berikutnya, 1998. Tujuan didirikannya Bayt Al Quds diantaranya adalah melindungi kota Yerusalem dan memberikan bantuan kepada penduduk Palestina, menjaga dan mengembalikan

²⁰http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=172&p_ref=58&lan=en, diakses tanggal 13 April 2015.

masjid Al Aqsha serta tempat-tempat suci lainnya sebagai warisan sejarah agama dan kebudayaan islam di Palestina. Komite ini bermarkas di Casablanka, Maroko.

3. Standing Committee for Information and Cultural Affairs (COMIAC)

COMIAC berdiri dari hasil resolusi KTT ke tiga di Mekah dan Thaif, Saudi Arabia pada tahun 1981. Komite ini didirikan dalam rangka memenuhi keinginan organisasi untuk memberikan informasi kepada publik mengenai itikad mulia umat islam terutama mengenai masalah Palestina. Tujuan lain didirikannya komite ini adalah untuk menghadapi kampanye yang tidak adil mengenai nama baik islam di dalam pergaulan internasional. Komite ini berkedudukan di Dakar, Senegal.

4. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC)

Bersama dengan COMIAC, COMCEC juga didirikan sebagai resolusi KTT Islam ke tiga OKI tahun 1981. Komite ini berdiri atas tujuan untuk menindaklanjuti resolusi di bidang ekonomi serta penggiatan kerjasama antar negara anggota OKI dalam rangka mencapai kesejahteraan di bidang ekonomi. Markas besar COMCEC berlokasi di Ankara, Turkey.

5. Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH)

Komite ini berdiri pada KTT OKI ke tiga, sama seperti halnya COMCEC dan COMIAC. Pendirian komite ini diharapkan mampu mengembangkan bidang pendidikan dan teknologi serta penguatan kerjasama antar negara anggota dalam

penggiatan bidang-bidang sains dan teknologi. Markas COMSTECH berlokasi di Islamabad, Pakistan.

H. Dinamika Tantangan yang Dihadapi OKI

Dunia Islam sedang menghadapi situasi yang mencemaskan dalam konteks iklim internasional, tantangan yang dihadapi dan penderitaan yang disebabkan oleh keterbelakangan, konflik politik dan intervensi eksternal. Sebagian besar anggota OKI kurang berkembang dan sebagian besar orang-orang Muslim hidup dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sulit. Konflik Timur Tengah yang berkepanjangan sementara Israel masih menduduki wilayah Arab dan Palestina. Penderitaan rakyat Palestina terus berlanjut di hadapan mata masyarakat internasional.²¹ Memang, permasalahan yang menyangkut konflik Israel-Palestina masih menjadi pekerjaan rumah bagi OKI yang pada dasarnya pembentukan organisasi ini diawali dengan tujuan untuk membereskan masalah bumi Palestina. Beberapa pencapaian OKI dan kerja keras komite AL-Quds serta badan sejenis di OKI nyatanya belum mampu membebaskan rakyat Palestina dan otomatis, tujuan utama Untuk mendukung dan memberdayakan rakyat palestina menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara berdaulat masih jauh dari realisasi.

Situasi di Irak, Lebanon, Somalia, Sudan, dan Afghanistan merupakan keprihatinan besar bagi OKI. Setelah Irak OKI juga perlu antisipasi dengan apa yang

²¹ E.Ihsanoglu, Pidato, Februari 2007, diakses dari http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=1349&ref=637&lan=en&x_key=OBSERVER%20MEMBER., tanggal 17 Maret 2015.

mungkin terjadi berkaitan dengan *file* nuklir Iran.²² Sebagaimana Resolusi PBB memperingatkan bahwa Iran harus membekukan pengayaan uraniumnya. Dewan Keamanan PBB secara aklamasi mengeluarkan satu resolusi yang ditujukan kepada semua negara akan larangan untuk memasok, menjual atau memindahkan dari semua jenis barang, bahan-bahan, peralatan, dan teknologi yang bisa membantu kepada program nuklir serta rudal balistik Iran.²³ DK PBB yang digawangi AS terus menekan Teheran untuk menghentikan proyek nuklirnya. AS menuduh Iran ingin mengembangkan senjata nuklir, namun dakwaan-dakwaan tersebut dibantah oleh Teheran yang mengatakan, bahwa pihaknya hanya ingin menyediakan energi bagi penduduknya yang makin bertambah.²⁴ Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran OKI bahwa akan ada kemungkinan serangan AS *part* ke II di negara Dunia Islam berkaitan dengan nuklir seperti halnya yang terjadi di Iraq pada tahun 2003.

OKI juga memiliki tantangan dengan masalah yang dihadapi oleh umat Islam di bagian lain dunia. Berbagai gelombang xenophobia, rasisme, stereotyping, diskriminasi dan islamofobia menargetkan Muslim di berbagai belahan dunia.²⁵ Hal ini semakin marak pasca tragedi 11 September yang menyudutkan Dunia Islam pada pergaulan internasional.

²² Ibid.,

²³ Ketua OKI Serukan Pemecahan Damai Masalah Nuklir Iran, Antara News, Rabu, 27 Desember 2006 diakses melalui <http://www.antaraneews.com/berita/49532/ketua-oki-serukan-pemecahan-damai-masalah-nuklir-iran>, tanggal 17 Maret 2015.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid.,

OKI, dengan begitu banyak tantangan yang dihadapi mencoba bangkit mengumpulkan kekuatan dan menjalin solidaritas intra negara OKI. Dialog-dialog yang mendukung pemecahan masalah-masalah dalam tubuh Dunia Islam juga telah dilakukan. Hal mendasar yang menjadi tantangan terbesar OKI sebenarnya datang dari dalam tubuh OKI. Islam sebagai kekuatan alternatif pasca tumbanganya Uni Soviet ternyata belum mampu bersatu. Negara-negara Islam dalam berhubungan internasional selalu mengedepankan kepentingan nasional negaranya masing-masing sehingga posisi tawarnya lemah.²⁶ Menilik dari kekuatan yang amat besar dari persatuan Dunia Islam, maka sudah semestinya menjadi agenda OKI untuk meningkatkan solidaritas dan menggalang persatuan Dunia Islam lebih intensif dalam rangka memecahkan masalah dan menghadapi tantangan umat Islam dalam politik global.

²⁶ Setyo Widagdo, 2012, Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan Dan Hak Veto Dalam Pengambilan Keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam <http://risalah.fhnmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/1.-Dasar-Pengaturan-Prinsip-Persamaan-Kedaulatan-Dan-Hak-Veto-Dalam-Pengambilan-Keputusan-di-Dewan-Keamanan-Perserikatan-Bangsa-Bangsa-Setyo-Widagdo.pdf>, diakses pada 13 April 2015.